



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR

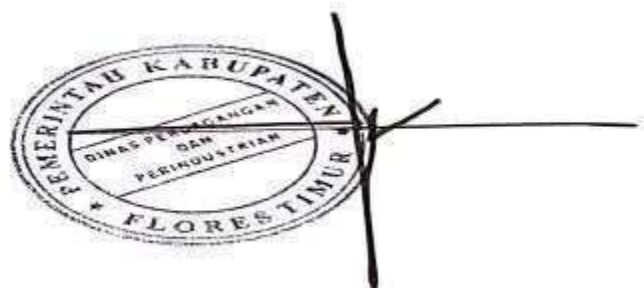
Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah .

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

Larantuka, Juni 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORESTIMUR,



SIPRIANUS SINARITAN, S. SOS. M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197001231 199903 1 056

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Peraturan Bupati Flores Timur	
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	II-12
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	II-19
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	III-4
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-2
------------	--	-----



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORESTIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORESTIMUR TAHUN 2023



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

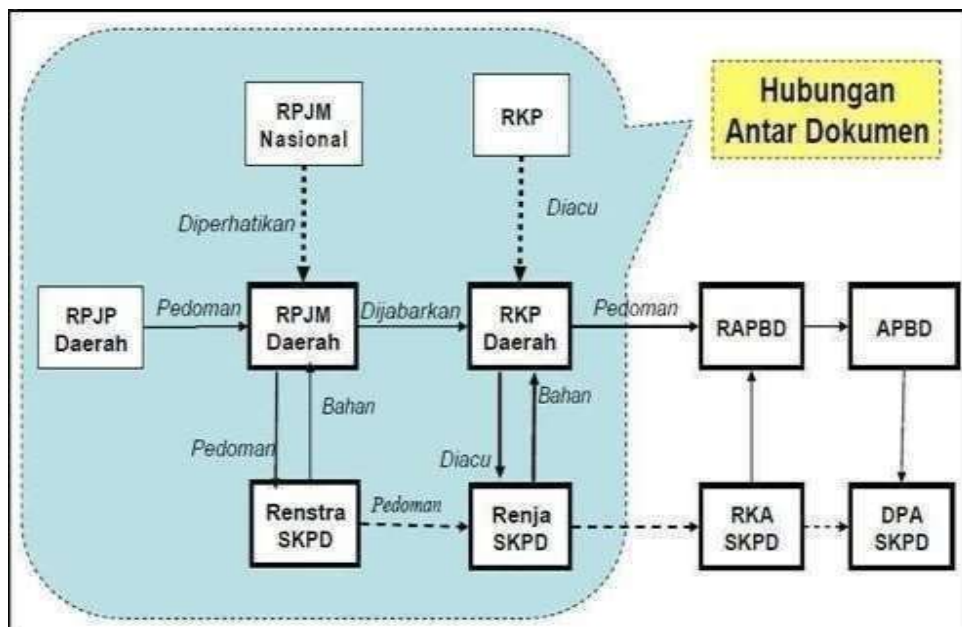
Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka

- penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
 6. Penetapan; dilaksanakan berdasar hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomodasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2023. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024.

BABV PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Lalu sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2022

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Akhir Tahun /Periode 2017/2022	Realisasi Target kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiata sampai dengan Tahun 2020	Target dan Ralisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun2021	Realisasi renja Pd Tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s / dThn 2022	Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan									10=5+7+9	11=10/4
1					2	3	4	5					1	
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	10	10	10	100	10	10	10
						Kualitas sarana dan prasarana	100	10	10	10	100	10	10	10
						Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	3	2	7		100		3	10
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan OPD(Dokumen)								

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Akhir Tahun /Periode 2017/2022	Realisasi Target kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan Ralisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun2021	Realisasi renja Pd Tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s / dThn 2022	Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
													10=5+7+9	11=10/4
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya jasa laporan capaian kinerja dan keuangan OPD(dokumen)	3	21	7	7	100	7	35	100
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keungan Perangkat Daerah (bulan)								
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dantunjangan ASN (bulan)	7	42	14	14	100	14	70	100
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	6	36	12	12	100	12	60	100
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (komponen)	4	24	8	8	100	10	42	100
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (unit)			-	-			4	100
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahanlogistik kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	18	129	35	30	86	25	184	99
						Tersedianyajasa kebersihan kantor (jenis)	7	26	14	14	100	20	60	86
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (lembar)	119.02	70.275	18.75	17.25	92	30.000	117.534	99
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan(jenis)		2	2	2	100		2	100
x	xx	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianyamakan danminum untuk rapat dan tamu (dos/OK)	4.76	1.378	13	13	100	250	1.762	37
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultas kedalam dan luar daerah(kali)	9	5	38	38	100	55	98	100

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Akhir Tahun /Periode 2017/2022	Realisasi Target kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan Ralisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun2021	Realisasi renja Pd Tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatans / dThn 2022	Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
													10=5+7+9	11=10/4
x	xx	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat (lembar)	1.16	900	11	11	10	150	1.165	100
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik (bulan)	6	36	12	12	10	12	60	100
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor(org/bln)	29/6	29	29	29	10	29		100
x	xx	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kualitas sarana prasaranaOPD(bulan)								
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinannya(unit)		7	7	7	10			100
						Terpeliharanya kendaraan dinas (unit)		3	3	3	10			100
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (unit)		1	1	1	10			100
x	xx	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	7	44	16	16	10		67	89
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengembangan pasar daerah		-	-	-				
						Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina								

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Akhir Tahun /Periode 2017/2022	Realisasi Target kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan Ralisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun2021	Realisasi renja Pd Tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan / d Thn 2022	Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
													10=5+7+9	11=10/4
3.	30	03	2.01		<i>Pembangunan dan Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan</i>	Tersedianya gedung pasar dan sarana penunjanglainnya								
3.	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya gedung pasar dan sarana penunjanglainnya(unit)	20	6	1	-				40
3.	30	03	2.02	02	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina								
3.	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Organisasi pedagang kaki lima dan asongan yang dibina (pedagang)	43	165	95	50	53	95	310	72
3	30	04			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Harga kebutuhan pokok yang stabil dan terkendali								
3.	30	04	2.01	01	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang pentinglainnya di Kabupaten / kota								
3.	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Agen danPasar Rakyat	Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar (kali)	9	69	4	4	100	19	92	97

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Akhir Tahun /Periode 2017/2022	Realisasi Target kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan Ralisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun2021	Realisasi renja Pd Tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan s / dThn 2022	Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
													10=5+7+9	11=10/4
3.	29	03	2.02		<i>Pengendalian Harga , Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>									
3.	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten atau Kota	Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategislainnya(kali)	5	38	38	11	2	38	8	153
3.	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategislainnya(kali)	2	4	-	-		12	1	80
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pengamanan dan perlindungan konsumen								
3.	30	06	2.01		<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	Terlindunginya konsumen produk tidak layak konsumsi dan perilaku curang pelaku usaha								
3.	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya kegiatan sindang tera-tera ulangperalatan UTPP setiaptahun (kali)	9	75	1	1	10		80	84
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan penjualan produk unggulan daerah	2	-	-	-				
3.	30	07	2.01		<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Akhir Tahun /Periode 2017/2022	Realisasi Target kinerja Hasil, Program dan Keluaran Kegiatar sampai dengan Tahun 2020	Target dan Ralisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun2021	Realisasi renja Pd Tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan / d Thn 2022	Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
													10=5+7+9	11=10/4
3.	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeriditingkat kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk yang dipromosi (jenis)	2	2	-	-		10	1	60
3.	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya data base perdagangan (dokumen)		3	1	1	100	1		40
						Tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan (kali)		3	-	-		1		20
3.	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang dikembangkan (%)								
						Julah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap(%)								
						Jumlah IKM yang di tata strukturnya (%)								
3.	31	02	2.01		<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	Terbinanya dan tertatanya kelompok IKM								
3.	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah industri kecil dan menengah yang difasilitasi (kelompok)	3	19	13	4	31	8	31	100
						Terbina dan tertatanya kelompok IKM	4	29				15	44	100
						Tercapainya pelayanan teknologi industri	49	25				15	40	82
3.	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah	Jumlah IKM yang ditata strukturnya	74	12	-	-		7	19	26

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Perdagangan											
1	Ekspor Bersih Perdagangan		√	-								Indikator Kinerja Tidak dijalankan
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usahainformal		√	37,13	35,25	18,17	22,71	13,63	7,5	18,17	22,71	Untuk cakupan bina kelompok pedagang / usaha belum maksimal karena dilakukan sesuai dengan penganggaran yang tersedia untuk tahun 2022 hanya dilakukan di satu titik di Waiwerang kec. Adotim yang hanya dapat melibatkan 35 kelompok usaha/pedagang
3	Presentase Alat-alat ukur timbang dan pereengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku		√	45	45	49	49	49	29,6	49	49	Untuk presentase alat ukur takar timbang juga tidak mengalami kenaikan karena ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini sangat terbatas sehingga tidak dapat menjangkau dilakukan sidang tera pada 19 titik di Kab. Flotim tetapi hanya dapat dilakukan di 2 titik saja dari target 4 titik di tahun 2022
2	Perindustrian		√									
4	Cakupan bina kelompok pengrajin		√	14	14	23	22	67,80	12,75	23	22	Pada tahun 2022 cakupan bina kelompok pengrajin tidak mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan untuk program ini tidak ada penganggaran untuk pemberdayaan kelompok akan tetapi pemberdayaan kelompok hanya dapat dari bantuan Pokir dprd yang nilainya tidak banyak dan tersebar diseluruh wilayah
5	Tersedianya Informasi industri secara lengkap dan terkini					Tersedia	Tersedia			Tersedia	Tersedia	

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan. Untuk indikator Ekspor Bersih Perdagangan tingkat realisasi capaian indikator tidak dapat dilakukan karena tidak ada Program/Kegiatan yang dijalankan. Untuk Indikator Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2021 tingkat realisasi 13,63 sedangkan Tahun 2022 7,5 % mengalami penurunan dikarenakan penganggaran untuk kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya mengalami penurunan jumlah pedagang yang dibina disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia, Presentase alat ukur takar timbang tahun 2021 29 % tahun 2022 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan karena pelaksanaan kegiatan tera tera ulang peralatan UTTP tidak maksimal dilakukan di semua kecamatan tetapi hanya dilakukan di 2 kecamatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, untuk Cakupan Bina Kelompok Pengrajin tahun 2021 sebanyak 12,75 % mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 23 % dilaksanakan melalui Program Perencanaan pembangunan dan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / kota Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat namun kegiatan teknis bidang di tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran yang ada hanya dari pokok pikiran DPRD sehingga menyebabkan tingkat Capaian Realisasi tidak mengalami peningkatan secara signifikan pada perangkat Daerah dalam mendukung kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pelayananan Perangkat Daerah

Salah satu tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu menjalankan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian. Peran dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sangat penting dan strategis dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak kendala yang dihadapi. Dalam urusan Perdagangan yakni sarana dan prasarana fasilitas pasar perlu banyak menjadi perhatian dan perlu dilakukan pembenahan. Perilaku pedagang yang belum sepenuhnya mentaati peraturan dan ketertiban yang ditetapkan, kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas yang mana kebanyakan pelaku usaha berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang masih seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen dan produksi serta pemasaran masih lemah, kemampuan SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan juga masih lemah Berkembangnya informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha dan kerjasama lintas sektor diharapkan dapat membantu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk berkembangnya perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur. Disamping itu dalam upaya pengembangan pasar masih menghadapi permasalahan yang sangat signifikan. Pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional masih memerlukan perhatian khusus dan dapat segera ditindaklanjuti.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini di rasa masih belum cukup untuk mewujudkan pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian secara maksimal, hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan urusan perdagangan dan urusan perindustrian antara lain :

Bidang Perdagangan :

1. Belum meratanya ketersediaan prasarana pasar di setiap kecamatan
2. Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi tentang komoditi perdagangan yang keluar dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Flores Timur
3. Masih rendahnya daya saing produk
4. Belum terbanungnya sistem informasi dan akses pemasaran produk unggulan daerah.

Bidang Perindustrian ;

1. Sarana dan Prasarana Industri Belum memadai
2. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif
3. Penggunaan alat teknologi
4. Penggunaan alat teknologi masih kurang
5. Belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan dan kelompok industri yang disebabkan oleh kurangnya pendampingan kelompok industri kecil menengah terpadu dan berkelanjutan.

Selain hal di atas, belum maksimalnya kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian disebabkan kondisi faktual seperti daya saing ekonomi karena belum optimalnya pengembangan Industri yang dipengaruhi oleh kurangnya peningkatan pemasaran produk industri kecil masyarakat di Kabupaten Flores Timur hal ini disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

Dengan kondisi geografis, sesungguhnya Kabupaten Flores Timur memiliki potensi sumber daya alam (pertanian, perikanan dan kelautan) yang memadai untuk meningkatkan perekonomian Daerah melalui pengembangan dan pengelolaan Industri Kecil Menengah.

Upaya meningkatkan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan Industri Kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar dan juga melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian tujuan dan sasaran Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur 2023 adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4 Sebagai berikut:

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO		NO. KEGIATAN						RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
							PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	5						6				7	6				7	
	0.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									Rp 2.752.814.840					Rp 3.096.814.840	
1	3.30..01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	Rp 2.202.814.840	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	Rp 2.296.814.840	
								Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%		
								Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%		
								Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	100%					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	100%		
	3.30.01.2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10	Rp 17.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	10	Rp 64.500.000	
	2.	29	0	1	00	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	Rp 27.500.000	Penambahan Sub Kegiatan untuk Penyusunan Dokumen perencanaan dan Musrenbang
	3.	30	0	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKAS KPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dok)	2	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKAS KPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dok)	2	Rp 14.000.000	
	3.	30	0	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dok)	3	Rp 7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	6	Rp 15.000.000	
	3.	30	0	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Rp 5.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Rp 8.000.000	
	3.30.01.2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3	Rp 1.602.142.099	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	100	Rp 1.588.142.099	
	3.	30	0	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	22	Rp 1.548.142.099	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	22/14	Rp 1.548.142.099	
	3.	30	0	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dok)	1	Rp 47.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dok)	12	Rp 20.000.000	Pagu disesuaikan dengan Kebutuhan

NO		NO. KEGIATAN						RANCANGANAWAL RKPD					HASILANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
								PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATA N	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGUINDIKATIF	PRO GRA M/ KEGIA TA N/ S U B KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGETCAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1					5			6				7	6				7	
		3.	30	01	2	02	07	Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlahlaporan keungan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporankeuanganbulanan/ triwulan / semesteran SKPD	2	Rp 7.000.000	Koordinasi dan penyusunanlaporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Larantuka(OPD)	Jumlah laporan keungan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD	2	Rp 20.000.000	PaguDisesuikan dengan Kebutuhan
		3.30.01.2.03						Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah			1	Rp 6.000.000	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	100	Rp 10.000.000	
		3.	30	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporanbarangmilik daerah pada SKPD	1	Rp 6.000.000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah padaSKPD	Larantuka(OPD)	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporanbarangmilik daerah padaSKPD (laporan)	2	Rp 10.000.000	
		3.30.01.2.05						Administrasi kepegawaian perangkat daerah				Rp 35.000.000	Administrasi kepegawaian perangkatdaerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	Rp 53.000.000	
		3.	30	01	2	05	05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12	Rp 5.000.000	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerjapegawai	Larantuka(OPD)	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaiankinerjapegawai (doku)	1	Rp 8.000.000	Pagu diseuikandengan Kebutuhan untuk Pelatihan Kinerja Pegawai
		3.	30	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugasdan fungsinya	Luar daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	Rp 15.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Luar daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan(orang)	3	Rp 30.000.000	
		3.	30	01	2	05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturanperundang- undangan	3	Rp 15.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang- undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yangmengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	1	Rp 15.000.000	
		3.30.01.2.06						Administrasi Umum perangkat Daerah				Rp 117.772.744	Administrasi Umum perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	Rp 132.772.744	
		3.	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantoryangdisediakan	3	Rp 2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka(OPD)	Jumlahpaket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Rp 2.500.000	
		3.	30	01	2	06	02	PenyediaanPeralatandanperlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdisediakan (paket)	2 paket ATKdan 2 paket bahan kelengkapan komputer	Rp 21.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Larantuka(OPD)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan(paket)	2	Rp 21.500.000	Pagu diseuikan dengan Kebutuhan
		3.	30	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yangdisediakan	2	Rp 4.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Larantuka(OPD)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	Rp 6.000.000	Pagu diseuikan dengan Kebutuhan
		3.	30	01	2	06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket bahanlogistikkantor yangdisediakan	1	Rp 21.000.000	Penyediaan Bahan logistik kantor	Larantuka(OPD)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)	1	Rp 21.000.000	
		3.	30	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah paket barangcetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket (jilid dan penggandaan)	Rp 10.772.744	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Larantuka(OPD)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (pktet)	1	Rp 10.772.744	

NO	NO. KEGIATAN						RANCANGANAWAL RKPD					HASILANALISIS KEBUTUHAN						
							PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATA N	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGUINDIKATIF	PRO G RA M/ KEG IATA N / S U B KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	5						6				7	6					7	
	3.	30	0	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang- undangan yang disediakan	1dokumen	Rp 1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturanperundang- undangan	Larantuka(OPD)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang- undangan yang disediakan (dok)	1	Rp 1.500.000		
	3.	30	0	2	06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12laporan	Rp 15.000.000	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka(OPD)	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	12	Rp 15.000.000		
	3.	30	0	2	08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalamdan luar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 42.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalamdan luar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasidankonsultasiSKPD (laporan)	12	Rp 54.500.000	Pagu disesuaikan untuk RAKOR	
	3.30.01.2.07						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				Rp 27.500.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	56	Rp 85.000.000		
	3.	30	0	2	07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlahunitkendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit roda2	Rp 25.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas operasionalataulapangan	Larantuka(OPD)	Jumlahunitkendaraan dinasoperasional atau lapangan yang disediakan (unit)	1	Rp 25.000.000		
	3.	30	0	2	07	06						Pengadaanperalatan dan mesin lainnya	Larantuka(OPD)	jumlah unit peratan mesin lainya yang disediakan (unit)	4	Rp 30.000.000	pagu diseukan untuk kebutuhan Kantor	
	3.	30	0	2	07	08	PengadaanAsettak berwujud	Larantuka (OPD)	jumlahunit asettakberwujud	1 unit sub domain Pemda (web Pemda)	Rp 2.500.00							
	3.	30	0	2	07	10						Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Larantuka(OPD)	jumlahsaranadan prasara gedungkantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	2	Rp 5.000.000		
	3.	30	0	2	07	11						Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukunggedngkantor atau bangunalainnya	Larantuka(OPD)	jumlah unit saraana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunagn lainnya yangdisediakanunit (unit)	49	Rp 25.000.000		
	3.30.01.2.08						Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)		Rp 314.400.000	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhanjasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)		Rp 315.400.000		
	3.	30	0	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12laporan	Rp 1.000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka(OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa suratmenyurat (laporan)	12	Rp 2.000.000		
	3.	30	0	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlahlaporanpenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangdisediakan	12laporan	Rp 35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka(OPD)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangdisediakan (laporan)	12	Rp 35.000.000		
	3.	30	0	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantoryang disediakan	12laporan	Rp 278.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka(OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantoryangdisediakan (laporan)	12	Rp 278.400.000		
	3.30.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)		Rp 83.000.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	Rp 48.000.000		

NO	NO. KEGIATAN						RANCANGANAWAL RKPD					HASILANALISIS KEBUTUHAN					
							PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGUINDIKATIF	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGETCAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	5						6				7	6				7	
	3.	30	01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, PajakdanPerijinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara yang dibawahpajak danperiinannya	Pajak7 unit (3 unit roda2,4 unit roda2 ; Pemeliharaan 1 unit roda4	Rp 28.000.00	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Larantuka(OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara yang dibawah pajak dan periinannya(unit)	7	Rp 28.000.000	
	3.	30	01	2	09	08						Pemeliharaan Aset tak berwujud	Larantuka(OPD)	Jumlh aset Tak berwujud yang dipelihara (unit)	1	Rp 5.000.000	
	3.	30	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunanlainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Rp 50.000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan lainnya	Larantuka(OPD)	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	Rp 10.000.000	Pagu disesuaikan dengan kebutuhan
	3.	30	1	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor ataubangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	12 leptop, 7 printer, 1infokus, 3PC, 4 AC	Rp 5.000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana GedungKantor atau bangunan Lainnya	Larantuka(OPD)	Jumlag sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara(unit)	28	Rp 5.000.000	
2	3.30..03						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	2,77%	Rp 120.000.00	Program Peningkatan Sarana DistribusiPerdagangan		Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	27,78%	Rp 120.000.00	
	3.30.03.2.01						Pembangunandan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pengelolaan saranadistribusi perdagangan		Rp 100.000.00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1	Rp 100.000.00	
	3.	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 Unit	Rp 100.000.00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Solor Barat, Adonara, Wulanggitan, AdonaraTimur	Jumlah sarana distribusi perdagangan (unit)	1	Rp 100.000.000	
	3.30.03.2.02						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				Rp 20.000.00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	5 pasar	Rp 20.000.00	
	3.	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1dokumen	Rp 20.000.00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Larantuka	Jumlahdokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1	Rp 20.000.000	
3	3.30..04						Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan PokokdanBarangPenting		Terkendalinya harga barang (perbandingan hargapasaran dan hargadasar) (Laporan)	19	Rp 140.000.00	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19 Kec	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dan harga dasar) (Laporan)	19	Rp 140.000.00	
	3.30.04.2.02						Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupate /kota				Rp 140.000.00	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupate /kota	19 Kec	Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkatpasar kabupaten / kota	3	Rp 140.000.00	

NO		NO. KEGIATAN						RANCANGANAWAL RKPD					HASILANALISIS KEBUTUHAN					
							PROGRA M/ KEGIATAN /SUB KEGIATA N	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGUINDIKATIF	PROGRA M/KEGIATA N /S U B KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1					5		6				7	6				7		
		3.	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan StokBarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku usaha Distribusi barangdalam1 (satu)Kabupaten / Kota			Rp 20.000.000	Pemantauan Hargadan StokBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	19 Kec.	Jumlahlaporanpemantauan hargadan stok barangkebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam1 (satu) kabupaten/ kota(laporan)	1	Rp 20.000.000		
		3.	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan StokBarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku ralyat yang terintegrasi dalamsisteminformasi	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalamsistem informasi perdagangan	5	Rp 20.000.000	Pemantauan HargadanStokBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi	19 Kec	Jumlahlaporanpemantauan hargadan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalamsisteminformasi perdagangan (laporan)	1	Rp 20.000.000		
		3.	30	04	2	02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yangberdampak dalam1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampakdalam1 (satu) kabupaten /kota	5	Rp 100.000.000	Pelaksanaan operasi pasar reguler danpasarkhusus yangberdampak dalam1 (satu)kabupaten/ kota	19 Kec.	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam1 (satu)kabupaten/ kota(laporan)	1	Rp 100.000.00		
4	3.30..06						Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		PersentasePerlindungan dan pengamanankonsumen (%)	38,67%	Rp 115.000.000	Program Standarisasi dan PerlindunganKonsumen		PersentasePerlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,67%	Rp 115.000.000		
	3.30.06.2.01						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Jumlah Peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi	945	Rp 115.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan		Jumlah Peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi	945	Rp 115.000.000		
		3.	30	04	2	01	01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang	415	Rp 70.000.000	Pelaksanaan metrologi legal berupa terateraulang	19 Kec.	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang(unit)	415	Rp 70.000.000		
		3.	30	04	2	01	02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	530	Rp 30.000.000	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	19 Kec.	Jumlah Pelau Usaha di Bidang Metrologi Legal yangDibina(orang)	530	Rp 30.000.000		
		3.	30	04	2	01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	50	Rp 15.000.000	Penyidikan Metrologi Legal	19 Kec.	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (unit)	50	Rp 15.000.000		
5	3.30..07						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk DalamNegeri		Cakupan IKMyangdifasilitasi	18,18%	Rp 75.000.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk DalamNegeri		Cakupan IKMyangdifasilitasi	18,18%	Rp 175.000.00		
	3.30.07.2.01						Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	3 IKM	Rp 75.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	3 IKM	Rp 175.000.00		
		3.	30	01	2	01	01	Pelaksanaanpromosi penggunaanproduk dalam negeridi tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeridi Tingkat Kabupaten/ Kota	3	Rp 25.000.000	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalamnegeri di tingkat Kabupaten / Kota	Larantuka, Kupang	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota(UMKM)	3	Rp 75.000.000	Pagudisesuaikan untuk kegiatan promosi IKM	
		3.	30	01	2	01	02	Pemasaran dan peningkatan produk dalamnegeridi tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Ratail, Marketplace, perhotelandan JasaAkomodasi	5	Rp 30.000.000	Pemasaran dan peningkatan produk dalamnegeri di tingkat Kabupaten / Kota	19 Kec.	Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Ratail, Marketplace, perhotelan dan JasaAkomodasi (UMKM)	5	Rp 55.000.000		

NO	NO. KEGIATAN							RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
							PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGUINDIKATIF	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGETCAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING		
1	5						6				7	6					7		
	3.	30	07	2	01	3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah data dan informasi sistem dan jaringaninformasiperdagangan	1	Rp 20.000.000	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	19 Kec.	Jumlah datadan informasi sistemdan jaringaninformasiperdagangan (DOK)	1	Rp 45.000.000	pagu disesuaikan untuk kebutuhan Sitem InformasiPerdagangan		
	0.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN																	
6	3.31..02						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian	15,15%	Rp 100.000.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian	15,15%	Rp 250.000.000			
	3.31.02.2.01						Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp 100.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten /Kota	1	Rp 250.000.000			
	3.	31	02	2	02	01	Penyusunan rencanapembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah rencana pembagunan industri Kabupaten/Kota	1	Rp 40.000.000	Penyusunan rencanapembagunan industri Kabupaten / Kota	Larantuka	Jumlah rencana pembagunan industri Kabupaten/Kota(DOK)	1	Rp 140.000.000	PaguDisesuaikanUntuk Kegiatan RencanaPembangunanIndustri		
	3.	31	02	2	02	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran sertamasyarakat	1	Rp 40.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran sertamasyarakat	Watololong Kec. Withama; Konga, Tenawahang Kec. Teteheha;Boru kedang, Boru Kec. Wulanggitang ; Menaga Kec. Solor Timur; Kolaka Kec. Tanjung Bunga;Tanalein Kec. Solor Barat; Danibao Kec.Ado. Barat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1	Rp 65.000.000	Pagudisesuaikan untuk pelatihan dan pendampingan terhadap IKM		
	3.	31	02	2	02	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunanindustri		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1	Rp 20.000.000	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencanapembangunan industri	Larantuka, Kupang	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan industri	1	Rp 45.000.000			
											Rp 2.752.814.840					Rp 3.096.814.840			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencana bawah atas (bottompplanning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari prangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembangkabupaten/kota yang langsungditujukan kepada prangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah.Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrembang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April tahun 2022 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi publik Tahun 2022.

Rekapitulasi Musrembang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dan hasil reses Anggota DPRD, kunjungan kerja Kepala Daerah dan proposal dari Masyarakat Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023**

Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	-	
	Kegiatan: pembanguan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah penglolaan sarana distribusi perdagangan		
	Sub Kegiatan; Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Ritaebang Kec.Solor Barat, Adonara Kec. Adonara, Boru Kec. Wulanggitang, Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur	Jumlah sarana distribusi perdagangan		Usulan Pembangunan gedung pasar dan sarana prasarana pendukung lainnya
2.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN HARGA BARANG PENTING		Terkendalnya harga barang		
	Kegiatan : Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota		Terkendalnya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tkt Pasar Kab/ Kota		Usulan dilakukannya

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sub Kegiatan : Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota	19 Kecamatan, Desa Lewopao, Nubalema Kec. Adonara Tengah, Lewoingu Kec. Titehena, Menanga Kec. Solor Timur, Lelenbala Kec. Adonara Timur, Ritaebang, Tanah Lein, Lamaole Kec. Solor Barat	<i>Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota</i>		Usulan Pemantau Harga pada pelaku usaha distribusi barang . Diakomodir dalam Rencana Kerja
	Sub Kegiatan: Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	kec. Tanjung Bunga, Larantuka, Wulanggintang, Adotim dan Adobar	<i>Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan</i>		Usulan Pemantauan harga Pada Pasar Rakyat . Diakomodir dalam Rencana Kerja
3.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen		
	Kegiatan; Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan				
	Sub Kegiatan; Pengawasan /	19 Kecamatan, Menanga Kec.	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyuluhan Metrologi Legal	Solor Timur	Legal yang Dibina		Usulan Pengawasan Terhadap Metrologi. Diakomodir pada Rencana Kerja
	Sub Kegiatan; Penyidikan Metrologi Legal	19 Kecamatan	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		Diakomodir dalam Rencana Kerja
4.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Cakupan IKM yang difasilitasi		
	Kegiatan : Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		<i>Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri</i>		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	19 Kecamatan	<i>Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota</i>		Usulan Pelaksanaan Promosi dalam Negeri. Diakomodir dalam Rencana Kerja
	Sub Kegiatan : Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	19 Kecamatan, Tenawahang Kec. Titehena	<i>Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi</i>		Usulan Terhadap pemasran peningkatan produk diakomodir dalam rencana kerja
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	19 Kecamatan	<i>Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan</i>		

No	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Cakupan Industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian		
	Kegiatan : Penyusunandan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	-	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Nobo Kec. Ile Boleng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakt	-	Usulan bantuan peralatan tenun ikat . Diakomodir dalam Rencana Kerja
		Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng		-	Usulan bantuan peralatan tenun ikat . Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Kelurahan Amagarapi		-	Usulan bantuan modal usaha Home Industry. Diakomodir dalam

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	catatan
		Kec.Larantuka			Rencan Kerja
		Desa Tiwatobi, Mudakeputu, Watotutu, Halakodanuan, Lewohala dan Riangkemie di Kecamatan Ile Mandiri		-	Usulan bantuan unt pengadaan bahan ba tenun ikat. Diakomo dalam Rencan Kerja
		Desa Tiwatobi, mudakeputu, Halakodanuan, Waotutu,Lewohala, Kecamatan Ile Mandiridan DesaRatulodong Kecamatan Tanjung Bunga			Usulan bantuan pengadaan Mesin ja dan Mesin Obras. Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Ds.Tiwatobi,Lewo hala,Watowiti Kec. Ile Mandiri dan Patisirawalang Lewobunga Kecamatan Tanjung Bunga			Usulan bantuan Pengadaan Peralata Pertukangan (mesin gergari mesin belah mesin profil). Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Mudakeputu dan Watotutu Kec. IleMandiri			Usulan bantuan . Pengadaan alat pertukangan (mesin belam gengam, mesin skap tangan.Diakomodir dalam rencana kerja

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Nisakarang, Lamapaha, Redontena, Suku Tokan dan Desa Muda Kecamatan kelubagolit			Usulan bantuan Pengadaan bahan baku berupa benang dan pewarna bagi kelompok tenun ikat. Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Desa Tiwatobi. Mudakeputu dan Watotutu Kec. Ile Mandiri			Usulan Bantuan peralatan pertukangan berupa mesin belam gengam, mesin kap tangan, mesin profil besar dan kecil, Jingsaw. Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Desa Nisakarang, Lamapaha, Redontena, Suku Tokan dan Desa Muda Kecamatan kelubagolit			Usulan bantuan pengadaan bahan baku berupa benang dan pewarna bagi kelompok tenun ikat (Pengadaan bahan baku berupa benang dan pewarna bagi kelompok tenun ikat). Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Desa Lamablawa, Lewopulo, Balaweling Noten, Weranggere, Desa Pledo Kecamatan Witihama			Usulan bantuan pengadaan bahan baku berupa benang dan pewarna. Diakomodir dalam Rencan Kerja

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa kalelu dan Titehena kecamatan Solor Barat			Usulan bantuan pengadaan sarana prasarana penampungan air bersih (Bantuan Tangkyair Fiber glas untuk pengrajin batu bata). Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Kelurahan Lamatwelu Kec. Adonara Timur			Usulan bantuan peralatan mesin pencetak batu bata. Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Desa Tuakepa Kecamatan Titehena			Usulan bantuan peralatan untuk produksi minyak kelapa . Diakomodir dalam Rencan Kerja
		Watololong, Balawelin Noten, Kec. Witiama, Konga, Tenawahang, Tuakepa Kec. Titehena, Boru Kedang, Boru Kec. Wulanggitang, menanga Kec. Soltim, Kolaka, Bandoni Kec. Tjg. Bunga, Tanahleu Kec. Solbar, dan ibao, Nimu dan ibao			Usulan bantuan bagi kelompok tersebar berupa peralatan dan bahan baku tenun ikat, peralatan petukangan dan bantuan lainnya untuk mengembangkan usaha home industry bagi kelompok . Diakomodir dalam Rencan Kerja

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Adobar, Kolipetung Kec. Adonara, Lewomuda, Blepanawa Kec. Demon Pagong, HinganKec. Klubagolit, Waiwerang Kota, Lamalota, Lelenbala, Bilal, Karing Lamalouk, Kec. Adonara Timur, Oe sayang Kec. Adoteng			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi JMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang dilaksanakan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional. Salah satu Prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yakni PN: *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*;

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) meningkatkan jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar dan juga melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM.

Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergitas pusat- daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-
				2021	2023
1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1. Meningkatkan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	1,25
		2. Meningkatkan pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59
		3. Laju inflasi daerah	Menurunnya Laju Inflasi Daerah	-2,02	0,45

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yakni: ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan daya saing daerah”*** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan. Sasaran dan target kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambaran Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut;

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1		2		3	4
1	Perekonomian Masyarakat	1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	1,25
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	0,36
				Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,28

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program Prioritas, 3 (tiga) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 sebagai berikut;

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN(satuan)	RENCANA TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				565.000.000			585.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				315.000.000			352.000.000
3.	30	04			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (Laporan)	19	19	140.000.000		19	152.000.000
3.	30	04	2.02		<i>Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota</i>	<i>Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota</i>	19		140.000.000			152.000.000
3.	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku usaha Distribusibarang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota (laporan)	19 Kec.	1	20.000.000	APBD II	1	25.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN(satuan)	RENCANA TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan(laporan)	Kec. Tanjung bunga, Larantuka, Wulanggitang, Ado. Timur, Ado. Barat	1	20.000.000	APBD II	1	22.000.000
3.	30	04	2.02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	19 Kec.	1	100.000.000	APBD II	1	105.000.000
3.	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi		18,18	175.000.000		22,73	200.000.000
3.	30	07	2.01		<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri (UMKM)</i>		3	175.000.000		3	200.000.000
3.	30	07	2.01	03	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota (UMKM)	Larantuka, Kupang	3	75.000.000	APBD II	3	70.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN(satuan)	RENCANA TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.	30	07	2.01	04	Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM)	19 Kec.	5	55.000.000	APBD II	5	65.000.000
3.	30	07	2.01	05	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (dokumen)	19 Kec.	1	45.000.000	APBD II	1	65.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				250.000.000			233.000.000
3.	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)		15,15	250.000.000		30,30	233.000.000
3.	31	02	02		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembagunan industri Kabupaten/Kota			250.000.000			233.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN(satuan)	RENCANA TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.	31	02	02	01	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota(dokumen)	Larantuka	1	140.000.000	APBD II	1	115.000.000
3.	31	02	02	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (dokumen)	Watololong, Lamabelawa, Lewopulo, Balawelin Noten, Weranggere, Pledo, Balaweling Kec. Witiham, Konga, Tenawahang, Tuakepa Kec. Titehena, Boru Kedang, Boru Kec. Wulanggitang, menanga Kec. Soltim, Kolaka, Bandona Kec. Tjg. Bunga, Tanahlein, Kalelu, Titehena Kec. Solbar, danibao,Nimun Danibao Kec. Adobar, Kolipetung Kec. Adonara, Lewomuda, Blepanawa Kec. Demon Pagong, Hinga, Nisakarang, Lamapaha, Redontena, Sukutokan, Muda Kec. Klubagolit, Waiwerang Kota, Lamalota, Lelenbala, Bilal, Karing Lamalouk, Lamatwelu Kec. Adonara Timur, Oe sayang Kec. Adoteng, Nobo, Boleng Kec. Ile Boleng, Kelurahan Amagarapati, Waibalun Kec. Larantuka, Tiwatobi, Mudakaputu, Watotutu dan 5 desa di kec. Ile Mandiri	1	65.000.000	APBD II	1	60.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN(satuan)	RENCANA TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.	31	02	02	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri(dokumen)	Larantuka, Kupang	1	45.000.000	APBD II	1	58.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANAKERJADAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			3.096.314.840						3.026.692.096
x	xx	01			ProgramPenunjang UrusanPemerintahan Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran(%)	100	2.296.314.840					10	2.216.692.096
						Persentase ketersediaan sarana dan prasaranaaparatur (%)	100						10	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						10	
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan(%)	100						10	
x	xx	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	10	64.500.000	Larantuka(OPD)				10	77.000.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	27.500.000	Larantuka(OPD)	APBD II			2	27.500.000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunandokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD(laporan)	2	14.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			2	19.500.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD(lpaoran)	3	15.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			3	18.000.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	5	8.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			5	12.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
x	xx	01	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)</i>	3	1.588.142.096	Larantuka (OPD)				3	1.592.142.096
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	22	1.548.142.096	Larantuka(OPD)	APBD II			22	1.548.142.096
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD(dok)	1	20.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	20.000.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD(laporan)	2	20.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			2	24.000.000
x	xx	01	2.03		<i>Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	1	10.000.000					1	15.000.000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)	1	10.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	15.000.000
x	xx	01	2.05		<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>		53.000.000						12.000.000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dok)	12	8.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			12	12.000.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkantugas danfungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	3	30.000.000	Luar daerah	APBD II			0	0

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan(orang)	3	15.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			0	0
x	xx	01	2.06	06	<i>Administrasi Umum perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	86	132.272.744					88	140.150.000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	3	2.500.000	Larantuka(OPD)	APBD II			3	2.500.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	4	21.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			2	21.000.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	2	6.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			2	6.000.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1	21.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	24.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakdan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2	10.772.744	Larantuka(OPD)	APBD II			2	15.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlahdokumenbahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (dokumen)	1	1.500.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	1.650.000
x	xx	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	12	15.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			12	20.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD (laporan)	12	54.500.000	Dalamdan luar daerah	APBD II			12	50.000.000
x	xx	01	2.07	07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i>	2	85.000.000					16	10.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yangdisediakan (unit)	1	25.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			0	0
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesinlainnya	jumlahpaket meubel yang disediakan(unit)	4	30.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II				0
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Saranadan Prasarana Gedungkantor dan bangunanlainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung knatr dan bangunanlainnya yangdisediakan (unit)	2	5.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	10.000.000
x	xx	01	2.07	11	Pengadaansarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunanlainnya	Jumlahunit sarana danprasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	49	25.000.000	Larantuka(OPD)					0
x	xx	01	2.08	08	<i>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusanpemerintah daerah (%)</i>		315.400.000						315.400.000
x	xx	01	2.08	01	PenyediaanJasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			12	2.000.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	35.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			12	35.000.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantor yangdisediakan (laporan)	12	278.400.000	Larantuka(OPD)	APBD II			12	278.400.000
x	xx	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</i>		48.000.000					100	55.000.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara yang dibawar pajak dan periinannya (unit)	7	28.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			7	28.000.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2						3	4	7	8	5	9			10	11
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud		Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara(unit)	1	5.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	5.000.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara(unit)	1	10.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			1	12.000.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor ataubangunan Lainnya		Jumlag sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunanlainnya yang dipelihara(unit)	28	5.000.000	Larantuka(OPD)	APBD II			28	10.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.846.314.840						2.793.692.096
3.	30	03			ProgramPeningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	27,78%	120.000.000					30,56%	100.000.000
3.	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1	100.000.000					1	90.000.000
3.	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlahtsarana distribusi perdagangan(unit)	1	100.000.000	Solor Barat, Adonara	APBD II			1	90.000.000
3.	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	5	20.000.000					4	10.000.000
3.	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlahtdokumenhasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan(dokkumen)	1	20.000.000	Larantuka	APBD II			1	10.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
3.	30	04			ProgramStabilitas Harga BarangKebutuhan Pokokdan BarangPenting	Terkendalinya harga barang (Laporan)	19	140.000.000	19				19	152.000.000
3.	30	04	2.02		Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhanpokok danbarang penting di tingkatpasar kabupaten / kota	19	140.000.000	19				19	152.000.000
3.	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku usaha Distribusibarangdalam 1(satu) Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barangkebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota (laporan)	1	20.000.000	19 Kec.	APBD II			1	25.000.000
3.	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sisteminformasi	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barangkebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sisteminformasi perdagangan(laporan)	1	20.000.000	Kec. Tanjung bunga, Larantuka, Wulanggitang, Ado. Timur, Ado. Barat	APBD II			1	22.000.000
3.	30	04	2.02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) kabupaten /kota	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam1 (satu) kabupaten/ kota(laporan)	1	100.000.000	19 Kec.	APBD II			1	105.000.000
3.	30	06			ProgramStandarisasi danPerlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,6	115.000.000	19Kec.				38,67	125.000.000
3.	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Peralatan UTPP dan Pelaku usaha yang diawasi	945	115.000.000					945	125.000.000
3.	30	06	2.01	01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang(unit)	415	70.000.000	19 Kec.	APBD II			415	60.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
3.	30	06	2.01	02	Pengawasan/ PenyuluhanMetrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	530	30.000.000	19 Kec.	APBD II			530	30.000.000
3.	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal(unit)	50	15.000.000	19 Kec.	APBD II			50	35.000.000
3.	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	CakupanIKM yangdifasilitasi	18,1	175.000.000					22,73	200.000.000
3.	30	07	2.01	01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri (UMKM)</i>	3	175.000.000					3	200.000.000
3.	30	07	2.01	03	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota (UMKM)	3	75.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II			3	70.000.000
3.	30	07	2.01	04	Pemasaran dan peningkatan produk dalamnegeri di tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Ratail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM)	5	55.000.000	19 Kec.	APBD II			5	65.000.000
3.	30	07	2.01	05	Peningkatan sistem danjaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringaninformasi perdagangan(dokumen)	1	45.000.000	19 Kec.	APBD II			1	65.000.000
	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			250.000.000						233.000.000
3.	31	02			Program Perencanaan danPembangunan Industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)	15,1	250.000.000					30,30	233.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGETKINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANGURUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGUINDIKATIF (RP)
2					3	4	7	8	5	9			10	11
3.	31	02	2.02		Penyusunan dan Evaluasi Rencana PembangunanIndustri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembagunan industri Kabupaten/Kota		250.000.000						233.000.000
3.	31	02	2.02	01	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah rencana pembagunan industri Kabupaten/ Kota(dokumen)	1	140.000.000	Larantuka	APBD II			1	115.000.000
3.	31	02	2.02	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri danperan serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (dokumen)	1	65.000.000	Watololong, Lamabelawa, Lewopulo, Balawelin Noten, Weranggere, Pledo, Balaweling Kec. Witiham, Konga, Tenawahang, Tuakepa Kec. Titehena, BoruKedang, Boru Kec.Wulanggitang, menanga Kec. Soltim, Kolaka, Bandon Kec. Tjg. Bunga, Tanahlein, Kalelu, Titehena Kec. Solbar, danibao,Nimun Danibao Kec. Adobar, Kolipetung Kec. Adonara, Lewomuda, Blepanawa Kec. Demon Pagong, Hinga, Nisakarang, Lamapaha, Redontena, Sukutokan, Muda Kec. Klubagolit, Waiwerang Kota, Lamalota, Lelenbala, Bilal, Karing Lamalouk, Lamatwelu Kec. Adonara Timur, Oesayang Kec. Adoteng, Nobo, Boleng Kec. Ile Boleng, Kelurahan Amagarapati, Waibalun Kec. Larantuka, Tiwatobi, Mudakaputu, Watotutu dan 5 desadi kec. IleMandiri	APBD II			1	60.000.000
3.	31	02	2.02	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri(dokumen)	1	45.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II			1	58.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

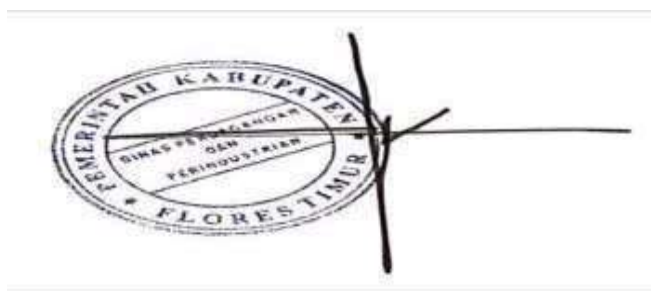
Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Larantuka, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
FLORES TIMUR,



SIPRIANUS SINARITAN. S. SOS. M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197001231 199903 1 056



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2022